



Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Satker Pusat Di Daerah Lingkup Kemenlhk

Factors Affecting the Level of Budget Absorption of Central Working Units (Satker) the KLHK

Dwi Perwita Sari Sutono¹, Novita Weningtyas Respati², Lili Safrida³

¹²³Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Banjarmasin.

Email: dwiperwitasarisutono@gmail.com, nwrespati@ulm.ac.id, lilisafrida.Banjar@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received: 20 Mei 2022

Accepted: 19 Juni 2022

Published: 20 Juni 2022

Keywords:

Planning; execution; control; regulation; budget.

DOI: [10.37859/jae.v12i1.3656](https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3656)

JEL Classification:

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan intern dan regulasi terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja satuan kerja pusat lingkup kementerian LK yang tersebar di daerah seluruh Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari kuesioner jawaban atas pertanyaan dari 193 responden. Metode pemilihan sampel dengan rumus slovin. Teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Sedangkan pengawasan intern tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja.

This study examined and analyzed the effect of budget planning, budget execution, internal supervision, and regulation on the level of absorption of the budget for the central working unit within the scope of the Ministry of Environment and Forestry spread over Indonesia. The primary data were derived from questionnaires to answer questions from 193 respondents. The sample selection used was the Slovin formula. The data were analyzed using a multiple linear regression analysis technique through the SPSS 26 program. Partial test results show that budget planning, budget execution, and regulations significantly affect the level of budget absorption.

PENDAHULUAN

Sejak diundangkan dan diterapkannya tiga jaminan UU Keuangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, Undang-Undang Perbendaharaan No.1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara No.15 Tahun 2004, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan anggaran negara, sehingga berdampak positif, salah satunya adalah pelaksanaan anggaran. Penyerapan anggaran merupakan indikator penting dalam roda perekonomian dan pembangunan pemerintah melalui tercapainya tingkat penyerapan anggaran belanja negara.

Masalah tingkat penyerapan anggaran di akhir tahun merupakan satu dari sekian masalah klasik yang sering muncul di Indonesia setiap periodenya. Realisasi anggaran pada awal periode (kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3) sangat kecil, namun terjadi peningkatan yang signifikan pada akhir periode (kuartal 4). Masalah tersebut berakibat dengan lambannya pelaksanaan rencana dan kegiatan pemerintah di awal tahun (semester pertama). Menurut Rusqiyati (2014) dalam Sudarwati et al., (2017) penyerapan anggaran pemerintah idealnya mengikuti “Kurva S” yang cenderung stabil di awal periode, kemudian naik di tengah dan kembali stabil menjelang akhir periode anggaran. Saat akhir periode anggaran, khususnya pada bulan Desember, seharusnya pemerintah tinggal menjalankan sedikit aktivitas dan menata kelengkapan pengelolaan anggaran (Rokhman, 2013) dalam Sudarwati et al., (2017). Permasalahan tingkat penyerapan anggaran belanja juga dialami oleh kementerian LK, selain penumpukan anggaran belanja kementerian LK, juga mengalami tidak terealisasi atau mundurnya target anggaran belanja per triwulannya pada tahun 2017 triwulan I menunjukkan realisasi lebih sedikit dari targetnya kemudian diikuti realisasi triwulan II, III dan IV dibawah dari target, kemudian tahun 2018 dan 2019 realisasi dibawah target baik triwulan I sampai IV kecuali pada triwulan II tahun 2019 realisasi sempat diatas target. Selain itu masalah penyerapan anggaran kementerian LK yaitu masih terdapat satuan kerja (satker) pusat yang berada di daerah yang memperlihatkan realisasi dibawah 90% dalam 3 tahun (2017- 2019) atau 2 tahun mengalami realisasi 90% dengan rata-rata persentase realisasi tahun 2017 88,52%, tahun 2018 78,18% dan tahun 2019 mengalami peningkatan 95,74%.

Tingkat penyerapan anggaran belanja negara diduga dipengaruhi oleh faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan intern dan regulasi. Anggaran merupakan hasil dari suatu rencana berupa daftar kegiatan yang lengkap, termasuk penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu Hasanah Nurmalia, (2017). Sementara itu, sesuai dengan ketentuan Badan Standar Akuntansi Pemerintahan (GASB) dalam Bastian I, (2010), anggaran didefinisikan sebagai: ... rencana operasi keuangan, yang mencakup perkiraan yang diusulkan. Pusat pemasukan yang diinginkan dalam penyediaan dana. Anggaran adalah alat penggerak bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Anggaran belanja pemerintah pusat/daerah termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang ditetapkan dengan undang-undang setiap tahun setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/DPR). Salah satu bentuk pelaksanaan anggaran yaitu dalam capaian penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran adalah *skill* pemerintah daerah untuk melakukan dan menjelaskan setiap aktivitas yang direncanakan (Mardiasmo, 2010). Dana yang telah disetujui diharapkan dapat diserap oleh pemerintah pusat.

Perencanaan merupakan pedoman untuk penganggaran yaitu berupa proses dalam menyusun rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam batas periode tertentu menurut Dirjen Perimbangan Keuangan (2013:127). Satuan kerja (satker) masih melakukan revisi terkait susunan program dan kegiatan satuan kerja (satker) dalam pelaksanaannya, mengartikan bahwa satuan kerja (satker) masih terdapat kelemahan- kelemahan dalam perencanaan anggaran yang mengakibatkan realisasi anggaran instansi terlambat. Pelaksanaan anggaran ialah kegiatan atau upaya- upaya yang dilakukan dalam mewujudkan seluruh rencana atau kebijakan yang sudah

diformulasikan dan diputuskan (BPKP, 2011). Prosedur implementasi anggaran yang selalu tertunda atau mundur dari rencana kegiatan dan target anggaran berdampak pada lambatnya tingkat penyerapan anggaran sehingga diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut. Pelaksanaan anggaran yang selalu tertunda atau mundur dari rencana kegiatan dan target anggaran menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran.

Pengawasan merupakan aktivitas tata usaha yang berhubungan kepada penyelidikan dalam meyakinkan apakah implementasinya sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan menjalankan perbaikan untuk implementasi yang belum terlaksana (Zulkifli, 2003). Pengawasan internal menjabarkan pemahaman yang memandai artinya aktivitas sudah dilakukan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Regulasi muncul dari bahasa Inggris, ialah regulation atau peraturan. Peraturan mempunyai arti ketentuan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk mengatur, pedoman yang digunakan dalam penataan sesuatu dengan aturan, serta ketentuan yang wajib dijalankan dan dipatuhi, menurut kamus bahasa Indonesia (Reality Publisher, 2008) dalam (Bastian I, 2010). Sedangkan regulasi memberikan arti membimbing tingkah laku seseorang atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dalam Hasni & Basukianto, (2016). Sehingga, proses pengelolaan pada organisasi-organisasi publik baik organisasi pemerintah pusat maupun daerah, yayasan, partai politik, NGO, organisasi keagamaan ataupun tempat peribadatan, maupun organisasi-oragniasi lainnya yang bersifat sosial harus sesuai regulasi publik, artinya aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Faktor penting dalam proses penyerapan anggaran salah satu adalah regulasi. Regulasi dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan dan memiliki kekuatan hukum dalam kaitannya dengan sengaja dibuatkan tata aturan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan regulasi terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja negara? Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan intern dan regulasi terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja negara.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian merupakan semua pegawai yang pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, Verifikator, Pejabat Penggada, pelaksana dan SPIP) satker pusat di daerah lingkup KemenLK sebanyak 190 satker dengan 1.520 pegawai/responden. Populasi mempunyai bagian dari jumlah dan karakteristik, bagian itu adalah sampel (Sugiyono, 2017). Dari rumus slovin didapat sampel yaitu tingkat kesalahan sebesar 10% untuk perhitungan sampel, yang diungkapkan Husein Umar, (2013, hlm 78) sebanyak 94 pegawai yang diwakili oleh pengelola keuangan (KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, Verifikator, Pejabat Penggada, pelaksana dan SPIP) satuan kerja yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Teknik pengumpulan data adalah data primer. Hasil jawaban dari sebaran kuesioner merupakan data primer penelitian ini. Teknik Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan pengumpulan data, dilakukan pengujian instrument, tujuannya untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas kuesioner. Tingkat validitas diketahui dengan uji validitas dengan analisa $r_{hitung} > r_{tabel}$, kemudian untuk uji reliabilitas diketahui dengan nilai Cronbach Alpha > 0.70 . Program SPSS 26 digunakan untuk membantu pengujian validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri uji normalitas, multikolinieritas, serta heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 26. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program program SPSS 26. Penelitian ini menggunakan uji hipotesis yaitu uji koefisien determinan (R^2), uji signifikan parsial (uji t). Uji secara parsial (uji t) dengan kriteria pengambilan keputusan, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, dengan taraf tingkat signifikansi

dibawah 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian uji signifikansi keseluruhan (uji F) dengan kriteria pengambilan keputusan nilai $F_{tabel} = f(k;n-k)$, $F = (4;193-4)$, $F_{tabel} = (4;189) = 2,42$ dengan tingkat kesalahan 5% bila nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_a (menerima hipotesa).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reabilitas dengan 94 sampel pegawai/responden. Sebelum dilakukan pengumpulan data dilakukan pengujian instrumen penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas kuesioner. Dinyatakan dengan seluruh variabel, nilai Corrected item-total correlation (r_{hitung}) > r_{tabel} (0,138), maka secara keseluruhan item kuesioner valid. Selanjutnya dilakukan uji reabilitas, hasil uji reabilitas diketahui bahwa koefisien Cronbach's alpha > 0,70 artinya seluruh item kuesioner reliabel. Tabel di bawah merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas variabel penelitian.

Tabel 1: Validitas Dan Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Kriteria	Cronbach's Alpha	Keterangan
Perencanaan Anggaran	10	Valid	0,864	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran	7	Valid	0,774	Reliabel
Pengawasan Intern	7	Valid	0,738	Reliabel
Regulasi	7	Valid	0,734	Reliabel
Tingkat Penyerapan Anggaran	6	Valid	0,710	Reliabel

Sumber: Program SPSS 26, Data diolah kembali (2021)

Pengujian Normalitas, Multikolinieritas, Dan Heterokedastisitas

Uji normalitas dalam penelitian menghasilkan nilai *Asymp. Sig.* (2-tailed) sebesar 0,200 artinya $\text{sig} > 0,05$ ($0,200 > 0,05$) jadi kesimpulan penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian multikolinieritas penelitian ini adalah non multikolinieritas dilihat dari besaran *Tolerance* > 0,10 atau sama dengan besaran VIF < 10. Kemudian uji heterokedastisitas diketahui menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu dimana terbentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2018, p. 138).

Tabel 2: Normalitas, Dan Multikolinieritas

Variabel	Jumlah Item	Kriteria	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan Anggaran	10	Normal	0,638	1,568	Non Multikolinieritas
Pelaksanaan Anggaran	7	Normal	0,789	1,268	Non Multikolinieritas
Pengawasan Intern	7	Normal	0,657	1,522	Non Multikolinieritas
Regulasi	7	Normal	0,814	1,229	Non Multikolinieritas

Sumber: Program SPSS 26, Data diolah kembali (2021)

Pengujian Hipotesis

Hasil uji koefisien determinan (R square) adalah 0,270 Artinya variabel bebas memiliki kemampuan dalam megungkapkan variabel terikat adalah sebesar 27% sisanya 73% diungkapkan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti teknologi

informasi, komitmen organisasi serta, kualitas sumber daya manusia dan lain- lain. Hasil uji t pada penelitian ini sebagai berikut H₁: Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, dinyatakan diterima. H₂: Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, dinyatakan diterima. H₃: Pengawasan intern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, dinyatakan ditolak. H₄: regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, dinyatakan diterima. Hasil uji F dilihat pada nilai F_{hitung} sebesar 17,367 dengan nilai F_{tabel} adalah 2,42 sehingga nilai F_{hitung} > F_{tabel} atau 17,367 > 2,42, dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima, jadi kesimpulannya adalah secara bersamaan variabel perencanaan anggaran (X₁), pelaksanaan anggaran (X₂), pengawasan intern (X₃) dan regulasi (X₄) berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja pada satker pusat lingkup kemen LK di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tabel 3: Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 ^a	0,270	0,254	2,953

a. Predictors: (Constant), Regulasi (X₄), Pengawasan Intern (X₃), Pelaksanaan Anggaran (X₂), Perencanaan Anggaran (X₁)

b. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja(Y)

Sumber: Data diolah kembali (2021)

Tabel 4: Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	t _{hitung}	t _{tabel}
H1	Perencanaan Anggaran Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja	2,952	1,973
H2	Pelaksanaan Anggaran Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja	6,779	1,973
H3	Pengawasan Intern Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja	1,882	1,973
H4	Regulasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja	2,418	1,973

Sumber: Program SPSS 26, Data diolah kembali (2021)

Tabel 5: Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	605,937	4	151,484	17,367	,000 ^b
	Residual	1639,877	188	8,723		
	Total	2245,813	192			

a. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja (Y)

b. Predictors: (Constant), Regulasi (X₄), Pengawasan Intern (X₃), Pelaksanaan Anggaran (X₂), Perencanaan Anggaran (X₁)

Sumber: Sumber: Data diolah kembali (2021)

Tabel 6: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig	Keterangan
	(<i>Unstandardized Coefficients</i>) B			
Konstanta	10,192			
Perencanaan Anggaran (X1)	0,159	2,952	0,004	Diterima
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,338	6,779	0,000	Diterima
Pengawasan Intern (X3)	0,134	1,882	0,061	Ditolak
Regulasi (X4)	-0,147	-2,418	0,017	Diterima

$$t_{tabel} = 1,973$$

$$F_{hitung} = 17,367$$

$$R = 0,519$$

$$\text{Sig } F = 0,000$$

$$R \text{ Square} = 0,270$$

$$\text{Adjusted } R \text{ Square} = 0,254$$

Sumber: Lampiran (Data diolah kembali, 2021)

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis pertama (H_1) menerangkan yakni perencanaan anggaran (X_1) berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja (Y). Hipotesis 1 diterima. Bukti empiris menunjukkan nilai koefisien regresi (0.159), tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil penelitian, kesimpulannya adalah perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, sehingga dapat dinyatakan H_1 diterima. Dari nilai koefisien regresi (0.159) bersimbol positif, artinya adalah semakin meningkat variabel perencanaan anggaran (X_1), menjadi meningkat pula tingkat penyerapan anggaran belanja (Y). Sebaliknya, semakin menurun perencanaan anggaran (X_1), menjadi menurun pula tingkat penyerapan anggaran belanja (Y). Dari uraian tersebut, jadi H_1 dinyatakan diterima yaitu perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda sama menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel perencanaan anggaran sebesar 0,159 dengan t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,952 > 1,973$) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan ($0,004 < 0,050$). Artinya perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja satuan kerja (satker) pusat lingkup KemenLK yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sesuai dengan teori agency hasil penelitian ini adalah Satuan kerja selaku agen memiliki perencanaan anggaran yang matang dalam pelaksanaan anggaran belanja akan dipandang mampu menghasilkan tingkat penyerapan anggaran belanja yang maksimal. Bersama tingkat penyerapan anggaran belanja yang maksimal artinya tujuan satker/ agen tercapai sesuai dengan tujuan principal bahwa anggaran belanja negara dapat terserap secara maksimal dan menghasilkan output maksimal berupa pelayanan publik terhadap masyarakat (principal).

Hasil penelitian ini di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musnawati et al., (2018), Kennedy, Nur Azlina, Julita, (2020), Gagola et al., (2017), Ruwaida et al., (2015), Malahayati et al., (2015), Zarinah M., Darwanis, & Abdullah S., (2016), Hasni & Basukianto, (2016), Ramdhani D. et al., (2017), Elim et al., (2018), Astuti et al., (2018), menyatakan bahwa perencanaan anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan, dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yumiati F. et al., (2016), Rifai A. et al., (2016) dan Yanuriza dkk., (2019). Pada dasarnya, satuan kerja (satker) yang mempunyai perencanaan anggaran yang baik menandakan semakin bagus pula target anggaran program kerja/ kegiatan ditetapkan yang nantinya sebagai dasar dalam pelaksanaannya dengan tercapainya target anggaran tersebut maka menjadi berpengaruh juga terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja satuan kerja (satker) tersebut. Hal tersebut berarti, perencanaan anggaran yang positif/ berpengaruh

signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja direspon oleh pemerintah pusat di daerah untuk segera melakukan percepatan penyerapan anggaran belanja.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis kedua (H_2) menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja (Y). Hipotesis 2 diterima. Bukti empiris menunjukkan nilai koefisien regresi (0,338), tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dari hasil pengujian variabel, kesimpulannya yakni pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikansi terhadap variabel tingkat penyerapan anggaran belanja, jadi hipotesis kedua diartikan diterima. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menerangkan yakni nilai koefisien regresi variabel pelaksanaan anggaran sebesar 0,338 dengan t_{hitung} yang lebih besar dari nilai t_{tabel} ($6,779 > 1,973$) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan ($0,000 < 0,050$). Hasil ini sama dengan perspektif teori *agency*, antara pelaksanaan anggaran dan tingkat penyerapan anggaran masing-masing menjadi semakin baik. Hal ini mampu mempengaruhi satuan kerja (satker) Pusat di daerah (agent) menjalankan tupoksinya sesuai dengan tujuan organisasi serta seperti harapan masyarakat (principal). Kemampuan pelaksanaan anggaran untuk menyerap anggaran jika realisasi penyerapan sesuai dengan hasil fisik yang sebenarnya dari kegiatan yang dilaksanakan, hasil fisik aktual dari kegiatan yang diasumsikan sama sesuai dengan tujuan target yang direncanakan (Lusiana 1997).

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani D. et al., (2017), Salwah, (2019), Malahayati et al., (2015), Gagola et al., (2017), dan Elim et al., (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai A. et al., (2016) dan Astuti et al., (2018). Secara umum, pelaksanaan program atau kegiatan di satuan kerja (satker) cukup baik, namun pelaksanaan program atau kegiatan belum dilakukan tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran kas, sehingga terkesan menumpuk di akhir tahun.

Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengendalian intern (X_3) berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y). Asumsi 3 ditolak. Bukti empiris menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi adalah (0,134), dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran, sehingga Hipotesis 3 ditolak. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pengendalian intern sebesar 0,134, t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($1,882 > 0,050$). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori *agency* yang diajukan, artinya pengawasan intern yang dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran oleh penerima amanah (agen) belum baik, maka menurunkan kinerja anggaran organisasi yaitu tingkat penyerapan anggaran belanja. Dimana pelaksanaan anggaran dilakukan dengan adanya pengawasan intern terhadap tahap perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi terdapat penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaannya yang akan memperlambat tingkat penyerapan anggaran belanja. Atas ketidaklancaran pengawasan intern yang dilakukan agen terhadap pelaksanaan anggaran dengan wujud capaian penyerapan anggaran yang maksimal baik dari segi ekonomi, efektif dan efisien (3E), yang mana hal tersebut juga tidak diinginkan dan dinikmati oleh pemberi amanah (principal). Artinya kinerja anggaran belanja organisasi mencerminkan kinerja yang buruk.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al., (2018), Fernandes Wanda et al., (2015), Rahmadita Ridha Putri, (2017) dan Kennedy, Nur Azlina, Julita, (2020) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Artinya jika 1) Pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan, 2) Tugas-tugas yang dilaksanakan bawahan supervisi oleh atasan, 3) laporan yang diterima Pimpinan diawasi dan dievaluasi secara rutin, 4) penjabaran

operasional merupakan pedoman terhadap kebijakan yang lebih tinggi, 5) Standar atau rambu-rambu yang harus dipatuhi dilaksanakan oleh seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana serta (6) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai dengan tugas serta fungsinya maka akan meningkatkan penyerapan anggaran.

Pengaruh Regulasi terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja

Hipotesis keempat mengungkapkan yakni regulasi (X_4) berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja (Y), sehingga hipotesis keempat dinyatakan diterima. Berdasarkan hasil pengujian variabel, dapat disimpulkan bahwa pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja, sehingga dapat dinyatakan H_4 diterima. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda mengungkapkan yakni nilai koefisien regresi variabel regulasi sebesar -0,147 dengan t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($1,889 < 1,973$) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari taraf signifikan ($0,000 < 0,050$). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa regulasi berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran tetapi berpengaruh negatif signifikan. Diketahui simbol hasil penelitian ialah negatif. Hasil penelitian ini berlawanan dengan asumsi logika berpikir yang diusulkan yakni semakin jelas regulasi maka untuk implementasinya menjadi semakin memudahkan pemegang amanah (*agency*) untuk merealisasikan program atau kegiatan di satuan kerja sehingga dihasilkan realisasi anggaran untuk program atau kegiatan secepatnya direalisasikan karena memiliki kekuatan hukum atau regulasinya yang jelas jadi para pelaksana tidak mengalami kebimbangan, yang tentunya pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan penerima amanah harus sesuai dengan visi, misi organisasi serta pemberi amanah (*principal*)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musnawati et al., (2018), penelitian Hasni & Basukianto, (2016), Ruwaida et al., (2015) dan Oktaliza et al., (2020) yakni regulasi berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai A. et al., (2016) dan Sanjaya, (2018) bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan.

SIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran artinya perencanaan yang matang yang dikelola oleh ASN, sehingga setiap program dan kegiatan tersebut dalam satu periode akan berjalan dengan baik juga, jadi target penyerapan anggaran tercapai. Faktor pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja artinya bahwa ASN sebagai pengelola anggaran makin cepat dalam melaksanakan, maka setiap program kerja atau kegiatan tersebut untuk satu periode anggaran akan berjalan dengan cepat juga, jadi target penyerapan anggaran tercapai. Faktor pengawasan intern tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja artinya terjadi dikarenakan satker tidak sering mengalami permasalahan tentang pengawasan intern, dimana pengawasan intern dirasa dilaksanakan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada setiap tahapan pelaksanaan anggaran meskipun waktu pelaksanaan program kerja/kegiatan tidak sesuai target anggaran sehingga tingkat penyerapan anggaran belanja rendah di triwulan I, II dan meningkat pada triwulan III dan IV.

Faktor regulasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja. Arah koefisien regresi yang negatif menyajikan ada hubungan yang berlawanan. Hal ini dikarenakan instansi jarang mendapatkan permasalahan terkait regulasi, yakni regulasi dianggap sudah jelas jadi memudahkan di dalam pelaksanaannya. Ketidaksignifikan karena instansi selalu berhati-hati atau terkesan takut dalam merealisasikan program dan kegiatan meskipun aturan sudah jelas. Penyebab kehati-hatian atau ketakutan yaitu banyaknya kasus korupsi yang dibawa sampai ranah hukum sehingga akan memperlamban realisasi penyerapan

anggaran belanja. Kemudian secara bersamaan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan intern dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja pada satker pusat lingkup kementerian LK di daerah yang menyebar di seluruh Indonesia. Hal ini berarti bahwa suatu satker yang memiliki perencanaan anggaran yang matang dapat melaksanakan program kerja/ kegiatan terencana sesuai dengan target anggaran dengan didukung oleh pengawasan intern yang baik terkait regulasi yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapai target anggaran setiap triwulannya dan dapat meningkatkan tingkat penyerapan anggaran dan sebaliknya.

SARAN

Dari temuan pada penelitian ini, dapat dijabarkan sebagian saran untuk dijadikan pertimbangan atau dijadikan referensi bagi para pihak terkait. Untuk pihak Pemerintah: Disarankan kepada pihak pemerintah, teruntuk pemerintah pusat yang di daerah agar senantiasa mengoptimalkan rancangan perencanaan anggaran, dan berusaha memaksimalkan pengawasan intern dan evaluasi bersama pihak pengelola anggaran dengan berpedoman pada regulasi dan prinsip-prinsip anggaran sektor publik terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan, sehingga penyerapan anggaran selalu berpotensi meningkat. Dan Berikutnya, disarankan kepada pemerintah khususnya pemerintah pusat lingkup kementerian LK yang di daerah untuk menanamkan komitmen dengan karakteristik anggaran sektor publik yang menuntut adanya komitmen dalam mengelola keuangan publik, yang mana komitmen bagi pengelola anggaran terhadap tujuan-tujuan organisasi pemerintah.

Untuk peneliti berikutnya: Kajian ini hanya untuk satu kementerian dan jumlah sampelnya kecil dan terbatas. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut di beberapa kementerian dan komisi dalam memperoleh yang lebih akurat. Kemudian untuk menambah masa penelitian agar data yang dihasilkan lebih valid dan komprehensif, sehingga bisa memenuhi segala kelemahan yang tersaji pada penelitian ini. Dan Penelitian ini hanya mengkaji empat variabel bebas yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian internal dan regulasi, sehingga disarankan untuk meneliti lebih lanjut variabel lain seperti komitmen organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan lingkungan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, I. A. M. R., Sadeli, D., Hidayat, N., Sarjana, S. P., & Pancasila, U. (2018). *Antecedent terhadap penyerapan anggaran belanja*. 2(3), 220–239.
- Bastian I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Saat (ed.); Edisi Ketu). Erlangga.
- BPKP. (2011). Desember 2011 - PARIS REVIEW 1. In *Menyoal Penyerapan Anggaran*.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56. <http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jaka/article/view/310/196>
- Fernandes Wanda, Kennedy, K., & Hanif, R. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33992.
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Hasanah Nurmalia, A. F. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit In Media.
- Hasni, N. T. ., & Basukianto. (2016). *Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*. 4(2), 1–15.

<http://www.albayan.ae>

- Kennedy, Nur Azlina, Julita, dan S. N. (2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis*. 13(2), 108–117.
- Malahayati, C., Islahudin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. In *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* (Vol. 4, Issue 1). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4451/3832>
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Nugroho.
- Musnawati, Basri Y.M, & Nasrizal. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(2), 081–090. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Rahmadita Ridha Putri. (2017). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia)*. 6(Desember), 1–18.
- Ramdhani D., Anisa, & Zaenur, I. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rifai A., Inapty, B. A., & Pancawati, S. (2016). Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Pemprov NTB). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1–10. <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i01.p01>
- Ruwaida, Darwanis, & Abdullah, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 101–110.
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 09(November 2019), 164–182.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah , Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Artikel*, 1–15.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun (Studi Kasus pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 129–138. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>
- Yumiati F., Islahuddin, & Nadirsyah. (2016). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan komitmen organisasi terhadap serapan anggaran skpa di pemerintah aceh. *Akuntansi*, 5(4), 43–49.
- Zarinah M., Darwanis, & Abdullah S. (2016). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. 5(1), 90–97.